

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari segi dampaknya terhadap kondisi fisik seseorang (kesehatan dan kesejahteraan) maupun non fisik (kecerdasan) (Atmanti, 2017). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakat (Mongan, 2019). Berdasarkan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945, pemerintah mengemban tugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk itu, pembangunan sumber daya manusia di anggap penting bagi Indonesia (Maharda & Aulia, 2020).

Indonesia diakui sebagai negara ke empat terbesar di dunia dengan total penduduk mencapai 277.858.332 jiwa. Selain terkenal dengan jumlah penduduknya yang padat, perekonomian Indonesia juga dikenal stabil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, Brunie Darussalam dan Singapura selama menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008. Berdasarkan data World Bank 2019 Indonesia menyumbang sebesar 39.4 % dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN, negara lainnya yaitu Thailand sebesar 16.19%, Singapore 12.2%, Malaysia 12%, dan sisanya oleh Negara ASEAN lainnya.

Namun kondisi tersebut lantas tidak menjadikan Negara Indonesia masuk dalam jajaran negara Maju untuk kategori wilayah ASEAN. Tingkat pembangunan manusia Indonesia masih lebih rendah dibawah negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia masuk kedalam kategori menengah dibanding dengan negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam dan Thailand yang masing-masingnya berada pada tingkat pembangunan sangat tinggi dan tinggi seperti yang terangkum dalam tabel 1.1 (Maharda & Aulia, 2020).

Tabel 1.1
IPM Asia Tenggara Tahun 2019

South East Asia HDI Rank	World HDI Rank	Country	Human Development Index (HDI)	Category
1	9	Singapore	0.935	Very High Human Development
2	43	Brunei Darussalam	0.845	
3	61	Malaysia	0.804	
4	77	Thailand	0.765	High Human Development
5	106	Filipina	0.712	
6	111	Indonesia	0.707	
7	118	Vietnam	0.693	Medium Human Development
8	140	Laos	0.604	
9	145	Maynmar	0.584	
10	146	Kamboja	0.581	

Sumber: Data Diolah Dari BPS

Jika ditinjau berdasarkan peringkat IPM di Asia Tenggara berdasarkan tabel 1.1, Indonesia menempati posisi ke enam dengan nilai indeks sebesar 0,707. Nilai tersebut masih di bawah Negara-negara asia tenggara lainnya seperti Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina yang notabene memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah lebih kecil dari Indonesia. Selain itu, IPM Indonesia masih belum merata untuk beberapa provinsi khususnya bagian timur Indonesia yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang masuk dalam tingkat IPM yang rendah di Indonesia (Maharda & Aulia, 2020).

Tabel 1.2
IPM 34 Provinsi Tahun 2015-2019

Provinsi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	69.45	70	70.6	71.19	71.9
Sumatera Utara	69.51	70	70.57	71.18	71.74
Sumatera Barat	69.98	70.73	71.24	71.73	72.39
Riau	70.84	71.2	71.79	72.44	73
Jambi	68.89	69.62	69.99	70.65	71.26
Sumatera Selatan	67.46	68.24	68.86	69.39	70.02
Bengkulu	68.59	69.33	69.95	70.64	71.21
Lampung	66.95	67.65	68.25	69.02	69.57
Kepulauan Bangka Belitung	69.05	69.55	69.99	70.67	71.3

Kepulauan Riau	73.75	73.99	74.45	74.84	75.48
DKI Jakarta	78.99	79.6	80.06	80.47	80.76
Jawa Barat	69.50	70.05	70.69	71.3	72.03
Jawa Tengah	69.49	69.98	70.52	71.12	71.73
DI Yogyakarta	77.59	78.38	78.89	79.53	79.99
Jawa Timur	68.95	69.74	70.27	70.77	71.5
Banten	70.27	70.96	71.42	71.95	72.44
Bali	73.27	73.65	74.3	74.77	75.38
Nusa Tenggara Barat	65.19	65.81	66.58	67.3	68.14
Nusa Tenggara Timur	62.67	63.13	63.73	64.39	65.23
Kalimantan Barat	65.59	65.88	66.26	55.98	67.65
Kalimantan Tengah	68.53	69.13	69.79	70.42	70.91
Kalimantan Selatan	68.38	69.05	69.65	70.17	70.72
Kalimantan Timur	74.17	74.59	75.12	75.83	76.61
Kalimantan Utara	68.76	69.2	69.84	70.56	71.15
Sulawesi Utara	70.39	71.05	71.66	72.2	72.99
Sulawesi Tengah	66.76	67.47	68.11	68.88	69.5
Sulawesi Selatan	69.15	69.76	70.34	70.9	71.66
Sulawesi Tenggara	68.75	69.31	69.86	70.61	71.2
Gorontalo	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49
Sulawesi Barat	62.96	63.6	64.3	65.1	65.73
Maluku	67.05	67.6	68.19	68.87	69.45

Maluku Utara	65.91	66.63	67.2	67.76	68.7
Papua Barat	61.73	62.21	62.99	63.74	64.7
Papua	57.25	58.05	59.09	60.06	60.84

Sumber: Data Diolah Dari BPS

Pada tabel 1.2 terlihat perkembangan Indeks Pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019. Secara keseluruhan tren IPM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika di lihat untuk ke 34 provinsi di Indonesia, nilai IPM di setiap provinsinya belum merata. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tercatat nilai IPM “sangat tinggi” berada pada provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 80.76%, hal ini menjadi wajar karena DKI Jakarta merupakan Ibu kota negara sehingga pengaplikasian kebijakan-kebijakan lebih mudah terlaksana. 22 provinsi lainnya berada pada status “tinggi” Sedangkan 11 provinsi berada pada status IPM “sedang”. Secara keseluruhan nilai IPM terendah berada di provinsi Papua, hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut peran pemerintah melalui pemanfaatan pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal dan efisien sangat diperlukan. Salah satunya melalui pengelolaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan mencapai kestabilan ekonomi (Isnaini, 2017). Untuk diketahui, jangkauan kebijakan fiskal sangat luas, maka dari itu jika dikaitkan dengan penelitian ini maka kebijakan fiskal yang dimaksud yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Sumber pendanaan dari pemerintah bagi bidang pendidikan harus cukup dan tepat sasaran. Berdasarkan indikator-indikator

dalam pengukuran IPM salah satunya yaitu pendidikan, maka peran pendidikan tersebut penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas bagi pembangunan manusia.

Tabel 1.3
Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 6 Negara di ASEAN

Negara	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan GDP (%)	
	2005	2017
Singapore	3.3	2.9
Brunei Darussalam	3.6	4.4
Malaysia	6.0	5.0
Thailand	3.9	4.1
Philippines	2.4	2.4
Indonesia	2.6	3.6

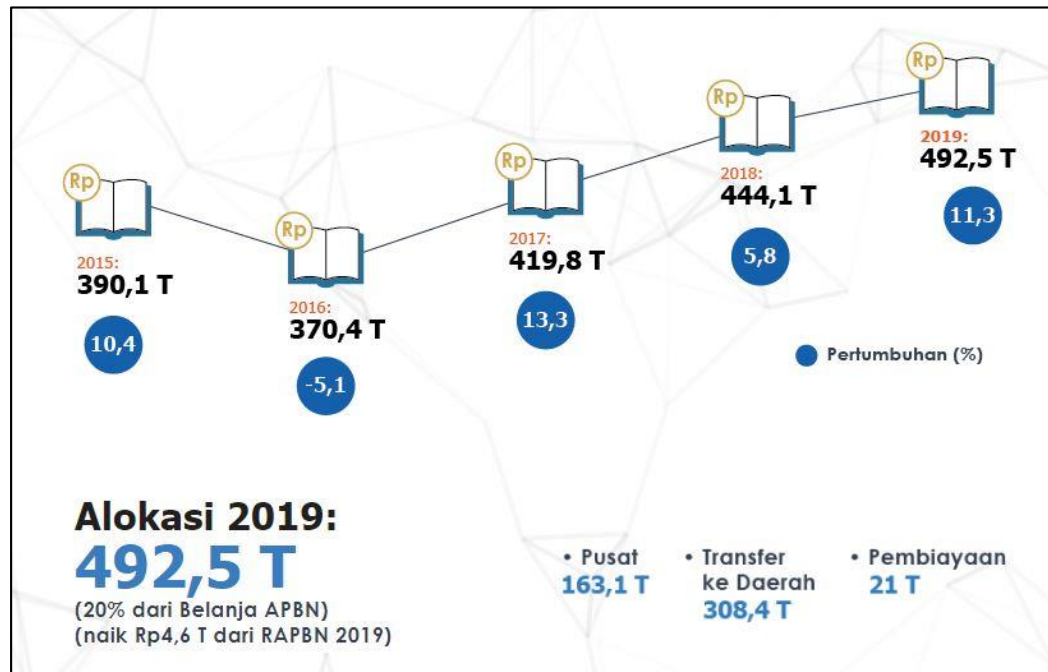
(Sumber : ASEAN Key Figures 2018)

Jika dilihat pada tabel 1.3 pengeluaran sektor pendidikan Indonesia pada tahun 2005 dan 2017 lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Sejak tahun 2005 Indonesia hanya menyumbang 3% dari keseluruhan PDB Indonesia. Hal ini menggambarkan adanya pengaruh yang kuat antara pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan pembangunan manusia.

Pendidikan merupakan elemen penting bagi pembangunan manusia. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan output atau tenaga kerja yang berkualitas dan handal dibidangnya. Hal tersebut akan berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja, semakin banyak jumlah lulusan tenaga kerja yang terampil maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi yang semakin meningkat. Pendidikan menjadi jembatan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai upaya tersebut, maka harus dibantu oleh pemerintah melalui alokasi belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. Peningkatan alokasi belanja

pemerintah di sektor publik juga akan meningkatkan produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas dapat meningkatkan pembangunan manusia yang pada gilirannya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan (Atmanti, 2017).



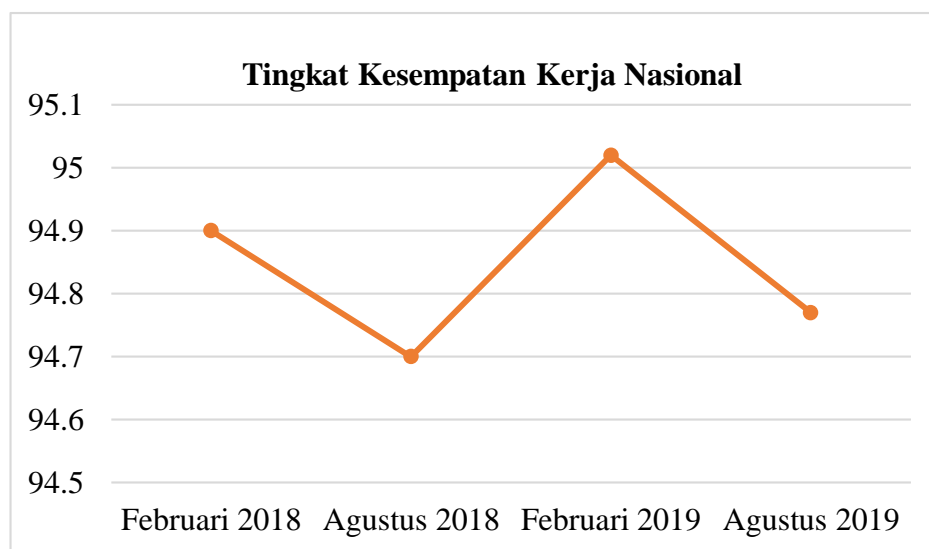
Sumber Data: KEMENKEU

Grafik 1.1
Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2015-2019

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 alokasi dana pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data grafik anggaran pendidikan pada grafik 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 anggaran pendidikan sempat mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 370,4 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 390.1. Namun pada tiga tahun setelahnya anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan yaitu Rp 419,8 triliun pada 2017, Rp 444,1 triliun pada 2018 dan Rp 492.5 pada tahun 2019.

Peningkatan mutu kualitas pendidikan tentu akan berdampak baik terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu yang berkualitas pula, yang nantinya akan mampu bersaing dalam dunia kerja. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus tahun 2019 pengangguran di Indonesia mencapai 7.05 juta orang dan jumlah angkatan kerja yang mencapai 136.18 juta orang (BPS, 2019). Hal ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan belum mampu terserap dalam pasar tenaga kerja selain itu kurangnya kesempatan kerja juga menjadi penyebab naiknya angka pengangguran.

Pembangunan manusia dan kesempatan kerja memiliki keterkaitan yang erat yaitu kesempatan kerja menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja serta peran masyarakat dalam mencapai pembangunan yaitu kesejahteraan.



Sumber Data: BPS 2019

Grafik 1.2
Tingkat Kesempatan Kerja Nasional

Jika dilihat pada grafik 1.2 tren tingkat kesempatan kerja di Indonesia berfluktuatif. Pada februari 2018 rata-rata TKK Nasional adalah naik sebesar 94.9 % dan di bulan agustus menurun sebesar 94.7 %. Kemudian di tahun 2019 pada bulan februari meningkat kembali sebesar 95.02 % dan bulan agustus menurun sebesar 94.77. rata-rata TKK Nasional yang berfluktuatif tersebut menggambarkan kesempatan kerja di Indonesia belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakmerataan kesempatan kerja ini menjadi salah penyebab ketidak merataan pula pada pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam studi penelitian sebelumnya, variabel Pengeluaran pemerintah ataupun kesempatan kerja untuk IPM telah banyak di bahas. Variabel penelitian yang diteliti dalam jurnal-jurnal tersebut masih tergantung pada studi kasus di daerah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada peningkatan IPM di 34 provinsi di Indonesia, dengan variabel independen yang berfokus kepada pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesempatan kerja. Jadi Peneliti ingin melihat sejauh mana realisasi belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesempatan kerja dapat mempengaruhi IPM. Untuk itu peneliti tertarik menyusun penelitian yang berjudul *“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesempatan Kerja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2019”*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah serta batasan penelitian maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh kesempatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2015-2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau referensi bagi akademik dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kontribusi pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk peneliti lain yang tertarik dengan topik penelitian yang sama.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam membangun pembangunan manusia di indonesia selain itu dapat menjadi bahan informasi serta pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas kesempatan kerja di Indonesia agar menjadi Negara yang maju dan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian anggaran belanja dibidang pendidikan. Selain itu dapat menjadi evaluasi bagi pembandingan kinerja pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya.